

BAB 3

METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metode pencarian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif dari sudut pandang peneliti;
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan pada instansi yang bersangkutan sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pejabat yang berwenang yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dari hasil wawancara, penulis akan memperoleh data mengenai gambaran umum, struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang, serta kebijakan dan prosedur di dalam instansi khususnya menyangkut kegiatan pelaporan keuangan.
- c. Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian di lapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan masalah dan sebagai dasar perbandingan dengan praktek di lapangan.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu UPT Departemen Kehutanan yang dalam pelaporan keuangan berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yaitu di Balai Besar KSDA Jawa Barat.

3.2.1. Visi dan Misi Balai Besar KSDA Jawa Barat

Visi : Menjadikan Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai pengelola kawasan konservasi terbaik tahun 2012

Misi :

- a. Mengamankan dan melindungi kawasan konservasi di Jawa Barat dan Banten secara terpadu
- b. Mempelajari dan mempublikasikan kawasan konservasi di Jawa Barat dan Banten secara berkelanjutan
- c. Memanfaatkan secara lestari sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat dan Banten

3.2.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat

Balai Besar KSDA Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDA yang berada di bawah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007, UPT KSDA merupakan UPT kelas I dan bertugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (KSDAH dan E) dan mengelola kawasan Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru (TB), koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) dan Hutan Lindung (HL) serta Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di luar kawasan konservasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 diwujudkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

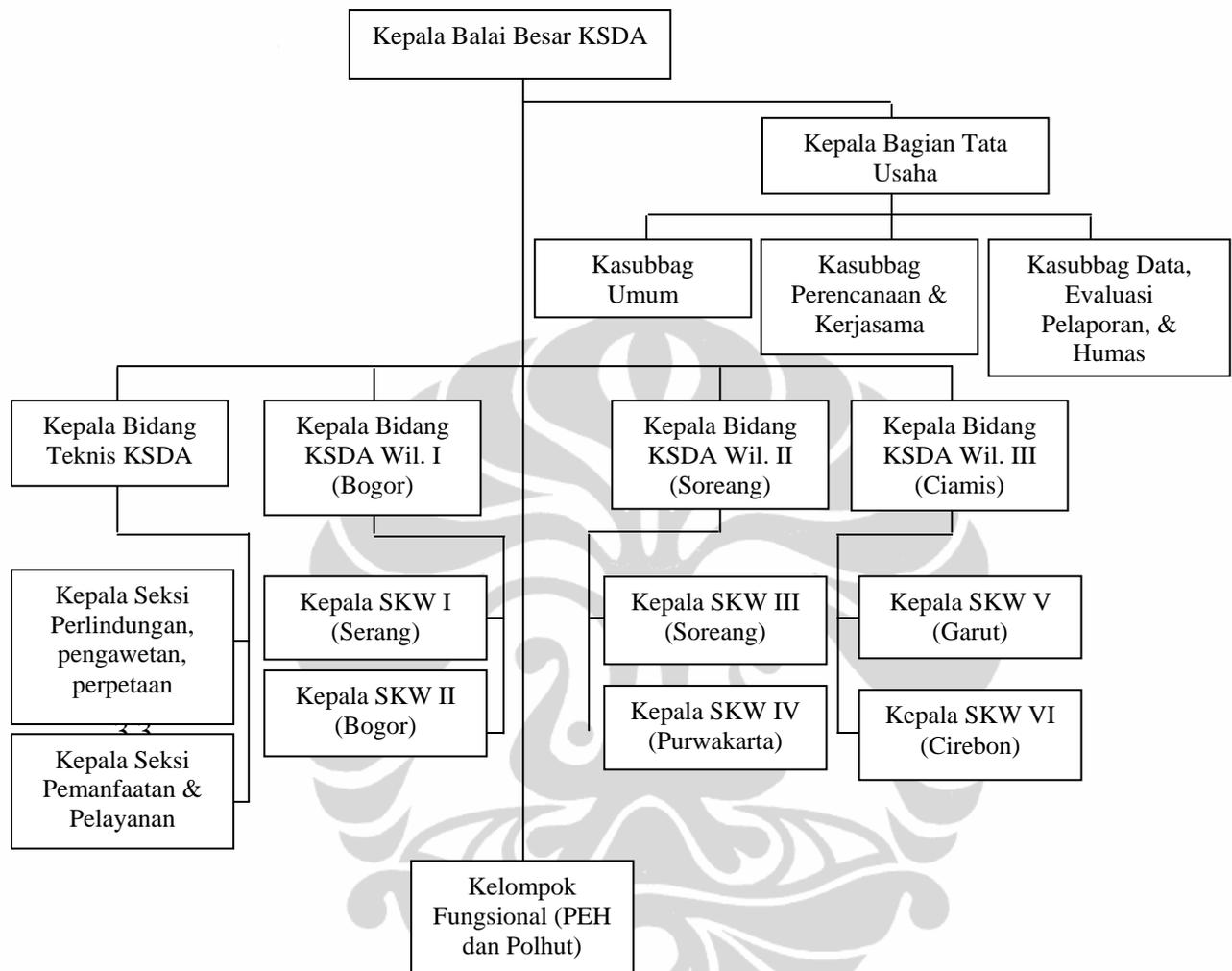
- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan CA, SM, TWA, dan TB, serta konservasi TSL di dalam dan di luar kawasan konservasi

- b. Pengelolaan kawasan CA, SM, TWA, dan TB, serta konservasi TSL di dalam dan di luar kawasan konservasi
- c. Koordinasi teknis pengelolaan Tahura dan HL
- d. Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan, hasil hutan dan TSL di dalam dan di luar kawasan konservasi
- e. Pengendalian kebakaran hutan
- f. Promosi, informasi KSDAH dan E
- g. Pengembangan Bina Cinta Alam serta penyuluhan KSDAH dan E
- h. Kerjasama pengembangan KSDAH dan E serta pengembangan kemitraan
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi
- j. Pengembangan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

3.2.3. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat

Balai Besar KSDA Jawa Barat berlokasi di Bandung, dan termasuk kategori tipe A yang terdiri dari Bagian Tata Usaha; Bidang Teknis KSDA; Bidang KSDA Wilayah I; Bidang KSDA Wilayah II; Bidang KSDA Wilayah III; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang KSDA Wilayah pada Balai Besar KSDA tipe A terdiri dari enam Seksi Konservasi Wilayah (SKW). Pada Balai Besar KSDA Jawa Barat, enam SKW dimaksud yaitu SKW I Serang, SKW II Bogor, SKW III Soreang, SKW IV Purwakarta, SKW V Garut, dan SKW VI Tasikmalaya.



Gambar 3.1. Struktur organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat

Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

3.2.4. Wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat

Wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat secara administratif meliputi dua provinsi (Jawa Barat dan Banten) yang termasuk dalam 52 kawasan konservasi seluas 83.149,34 Ha yang terdiri dari Cagar Alam, Cagar Alam Laut, Suaka Margasatwa, Suaka Margasatwa Laut, Taman Wisata Alam, Taman Wisata Alam Laut, dan Taman Buru. Kawasan yang tidak termasuk dalam wilayah pemangkuan Balai Besar KSDA Jawa Barat adalah Tahura yaitu Tahura Ir. H. Juanda, Tahura Pancoran Mas, dan Tahura Gunung Palasari). Ketiga Tahura tersebut di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan setempat namun tetap ada koordinasi teknis dengan Balai Besar KSDA Jawa Barat.

3.2.5. Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai Koordinator UPT Departemen Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Menteri Kehutanan sebagai pengguna anggaran/ barang di propinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk selaku koordinator, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat ditunjuk sebagai koordinator bidang anggaran/ barang di provinsi Jawa Barat. Satker – satker yang ada di bawah koordinasi Balai Besar KSDA Jawa Barat sebanyak 11 satker yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (BPPK) Kadipaten, BPPK Bogor, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Cimanuk Citanduy, BPDAS Citarum Ciliwung, Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa dan Madura, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai Besar Taman Nasional (TN) Gunung Gede Pangrango, Balai TN Gunung Halimun, Balai TN Gunung Ciremai, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Ciamis, dan Balai Penelitian Teknologi Perbenihan (BPTP) Bogor.

Selanjutnya sebagai koordinator, dalam pelaporan keuangan juga difungsikan sebagai UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Tugas penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat wilayah dengan fungsi sebagai berikut menyelenggarakan akuntansi keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, dan memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

